

Ancaman Hoaks terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia

Rizka Mukaromatussalisah^{1*}, Siti Nur Azizah², Nandia Permata Sari³, Zaenul Slam⁴

^{1,2,3,4}Program Studi PGMI, Universitas Islam Negeri Jakarta, Jl. Raya Bojongsari No.55, Bojongsari Baru, Kec. Bojongsari, Kota Depok

E-mail: mukaromatussalisahrizka@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6550>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 09 May 2026

Revised: 24 May 2026

Accepted: 10 June 2026

Kata Kunci:

Hoaks, literasi digital, demokrasi, media sosial, Indonesia.

Keywords:

Hoaxes, digital literacy, democracy, social media, Indonesia.

ABSTRACT

Studi ini bertujuan untuk menganalisis penyebaran informasi palsu di Indonesia, mengidentifikasi penyebab tingginya tingkat penyebaran berita hoaks, menilai dampaknya terhadap kualitas demokrasi, serta mengusulkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi penyebaran hoaks di internet. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan literatur, dengan mengumpulkan informasi sekunder dari jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, laporan resmi, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, sementara analisis dilakukan secara deskriptif dan kualitatif melalui tahap-tahap seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi palsu di Indonesia dipengaruhi oleh rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, budaya komunal yang kuat, algoritma media sosial yang mengutamakan keterlibatan pengguna, polarisasi politik, bias konfirmasi, serta motivasi individu untuk mendapatkan pengakuan sosial. Hoaks memberikan dampak negatif terhadap kualitas demokrasi karena dapat menciptakan opini publik yang menyesatkan, mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi, meningkatkan polarisasi sosial, dan mengganggu proses pemilu. Upaya untuk melawan hoaks dapat dilakukan dengan cara meningkatkan literasi digital, memperkuat regulasi pemerintah, bekerja sama dengan platform media sosial, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memverifikasi informasi serta melaporkan konten yang menyesatkan.



This study aimed to analyze the spread of misinformation in Indonesia, identify the factors contributing to the high circulation of hoaxes, examine their impact on the quality of democracy, and propose strategies to reduce the dissemination of false information in digital spaces. This research employed a qualitative approach through a literature review method by collecting secondary data from scientific journals, books, academic articles, government reports, and other relevant documents related to the research topic. Data was gathered using documentation methods and analyzed descriptively through qualitative procedures, which include data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicated that the spread of hoaxes in Indonesia was influenced by several factors, including low levels of digital literacy, strong communal culture, social media algorithms prioritizing user engagement, political polarization, confirmation bias, and individuals' desire for social recognition. Hoaxes negatively affected the quality of democracy by shaping misleading public opinion, decreasing public trust in government and institutions, intensifying social polarization, and disrupting electoral processes. The study also found that efforts to mitigate hoaxes could be implemented through strengthening digital literacy, enhancing government regulations, establishing collaboration with social media platforms, and encouraging active public participation in verifying information and reporting misleading content.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Rizka Mukaromatussalisah, et al (2026). Ancaman Hoaks terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia, 4(4) 26884-26893. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6550>

PENDAHULUAN

Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi secara signifikan mengubah cara hidup orang-orang, terutama dalam hal akses, produksi, dan pembagian informasi. Kehadiran internet dan platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan X telah memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat tanpa batasan waktu dan lokasi. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2024), penggunaan internet di Indonesia terus meningkat, menghasilkan tingkat keterlibatan digital yang tinggi di kalangan masyarakat. Namun, kemudahan akses ini juga menghadirkan tantangan, termasuk meningkatnya penyebaran berita palsu atau hoaks yang sulit untuk dikendalikan. Keterampilan literasi digital yang kurang memadai membuat masyarakat lebih rentan untuk menerima dan membagikan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. (Kurnia & Astuti, 2017).

Permasalahan penyebaran informasi palsu semakin menjadi perhatian dalam konteks demokrasi, terutama menjelang pemilu. Pada periode ini, jumlah informasi politik meningkat pesat dan seringkali dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyebarkan berita bohong, propaganda, atau ucapan kebencian. Wardle dan Derakhshan (2017) menegaskan bahwa penyebaran informasi yang salah di era digital memiliki pengaruh besar terhadap opini publik dan stabilitas demokrasi. Informasi yang disajikan secara provokatif, emosional, dan sensasional cenderung lebih mudah menarik perhatian orang ketimbang konten yang berbasis fakta (Vosoughi, Roy, dan Aral, 2018).

Dampak berita palsu terhadap kualitas demokrasi tidak boleh diabaikan. Informasi yang menyesatkan dapat merubah persepsi publik secara keliru, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik, serta memperburuk perpecahan sosial. Allcott dan Gentzkow (2017) menjelaskan bagaimana berita palsu dapat memengaruhi preferensi politik dan perilaku pemilih dalam proses demokrasi. Selain itu, isu sensitif terkait etnis, agama, ras, dan hubungan antarkelompok sering kali dieksploitasi untuk memperdalam konflik sosial dalam masyarakat. (Lim, 2017).

Di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi penyebaran informasi yang salah melalui kebijakan, pengawasan konten online, serta kerjasama dengan beragam platform media sosial. Namun, pendekatan yang hanya mengandalkan tindakan hukum belum sepenuhnya sukses tanpa kesiapan masyarakat dalam menangani aliran informasi digital yang sangat besar. Menurut UNESCO (2019), meningkatkan literasi media dan informasi merupakan strategi penting untuk membangun masyarakat yang kritis dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital.

Oleh karena itu, pengembangan literasi digital menjadi solusi utama untuk menghadapi masalah berita bohong di Indonesia. Literasi digital mencakup bukan hanya kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, mengevaluasi informasi, serta memahami etika

Komunikasi di dunia digital (Gilster 1997). Selain itu, kerjasama antara pemerintah, platform digital, lembaga pendidikan, organisasi komunitas, dan generasi muda sangat penting untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, dan demokratis.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kemajuan media sosial telah mengubah cara komunikasi politik menjadi lebih terbuka, tetapi juga meningkatkan risiko penyebaran informasi palsu yang mempengaruhi persepsi masyarakat. Usaha untuk mempengaruhi opini publik melalui media sosial dilakukan secara terencana dan menjadi tantangan bagi demokrasi digital di banyak negara, termasuk Indonesia. Informasi yang menyesatkan selama periode politik, terutama saat pemilu, dianggap mampu secara sengaja membentuk pandangan publik melalui penyebaran informasi yang tidak akurat secara strategis. (Assyahida, 2025)

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pertumbuhan pesat media sosial telah meningkatkan penyebaran berita palsu di Indonesia, yang berdampak pada sistem demokrasi. Media sosial dianggap sebagai lingkungan yang rentan untuk penyebaran informasi yang salah, yang dapat mempengaruhi opini publik dan mengancam persatuan masyarakat. (Febriansyah, 2016)

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa penyebaran informasi yang salah dan berita palsu di Indonesia telah menjadi masalah besar di era digital. Studi ini menjelaskan bahwa berita palsu memengaruhi tidak hanya pandangan masyarakat terhadap informasi tetapi juga berdampak pada stabilitas politik dan mengurangi kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Meningkatnya penggunaan media sosial di Indonesia semakin mempercepat penyebaran informasi yang tidak benar, menyoroti pentingnya peningkatan keterampilan digital dan pengawasan terhadap konten daring. (Sarjito, 2024)

Kelompok penelitian kami berbeda dari studi sebelumnya dalam hal fokus dan solusi yang diajukan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji penyebaran informasi palsu dan dampaknya terhadap demokrasi digital, tetapi juga menekankan peran penting literasi digital sebagai solusi utama untuk mengatasi masalah misinformasi di Indonesia. Kami juga menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah, platform digital, lembaga pendidikan, komunitas, dan pemuda dalam menciptakan ekosistem digital yang positif. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Assyahida (2025) berfokus pada penggunaan media sosial untuk mempengaruhi opini publik secara strategis selama periode politik, studi Febriansyah (2016) menekankan media sosial sebagai ruang yang rentan untuk penyebaran hoaks yang dapat mengancam persatuan masyarakat, dan penelitian Sarjito (2024) lebih terfokus pada dampak hoaks terhadap stabilitas politik dan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Dengan cara ini, penelitian kelompok kami memberikan wawasan baru dengan menghubungkan dampak hoaks terhadap demokrasi digital dengan peningkatan literasi digital sebagai langkah pencegahan dan solusi jangka panjang.

Berdasarkan penjelasan tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis elemen-elemen yang berperan dalam penyebaran informasi yang tidak tepat di Indonesia, mengevaluasi dampaknya terhadap kualitas demokrasi, dan mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk melawan informasi yang salah melalui peningkatan literasi digital, peran pemerintah, dan partisipasi masyarakat. Diharapkan, hasil penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis sebagai kontribusi dalam studi komunikasi digital dan demokrasi, serta wawasan praktis bagi masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan dalam merumuskan strategi untuk mengatasi informasi yang salah di Indonesia.

METODE

Pengamatan ini menggunakan metodologi kualitatif melalui tinjauan referensi. Metode kualitatif dipilih sebab tujuan dari pengamatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman secara mendalam tentang penyebaran hoaks di Indonesia, dampaknya terhadap kualitas demokrasi, serta berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menganalisis sumber-sumber tulisan yang relevan.

Tinjauan pustaka dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, menganalisis, membandingkan, dan mengevaluasi beragam referensi ilmiah yang berkaitan dengan topik yang diteliti, termasuk jurnal nasional dan internasional, artikel penelitian, buku referensi, laporan resmi pemerintah, temuan penelitian sebelumnya, serta dokumen lain yang membahas isu-isu terkait hoaks, literasi digital, media sosial, demokrasi, dan komunikasi politik digital. Penelitian ini berlangsung pada Mei 2026 dan tidak terbatas pada lokasi fisik tertentu, karena semua prosedur penelitian dilakukan secara daring melalui pencarian sumber literatur elektronik, seperti Google Scholar, portal jurnal nasional, situs web resmi pemerintah, dan publikasi dari lembaga terkait yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Fokus dari penelitian ini adalah fenomena penyebaran hoaks di Indonesia, khususnya pada momen-momen penting dalam demokrasi, seperti pemilu, kampanye politik, dan aktivitas politik digital di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penyebaran hoaks, dampaknya terhadap kualitas demokrasi, serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hal ini melalui peningkatan literasi digital, perbaikan kebijakan pemerintah, dan pemberdayaan partisipasi aktif masyarakat. Subjek penelitian ini mencakup data sekunder yang dikumpulkan dari beragam referensi tulisan, termasuk jurnal akademik, karya tulis, artikel akademik, laporan hasil observasi, informasi dari media terkemuka, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Teknik pemilihan sumber dilakukan dengan sampling purposif, yaitu memilih sumber secara sengaja berdasarkan kriteria seperti relevansi, kredibilitas, ketepatan waktu publikasi, dan hubungannya dengan fokus penelitian.

Prosedur penelitian dilakukan dalam beberapa tahap. Dimulai dengan identifikasi dan perumusan permasalahan penelitian yang berkaitan dengan tingginya penyebaran hoaks di ruang digital Indonesia. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data dengan mencari berbagai sumber literatur menggunakan kata kunci tertentu, seperti hoaks, demokrasi digital, media sosial, disinformasi, dan literasi digital. Setelah pengumpulan data selesai, tahap berikutnya meliputi pemilihan dan pengelompokan sumber dengan menyaring referensi yang paling relevan dan mengelompokkannya berdasarkan tema, seperti penyebab penyebaran hoaks, dampaknya terhadap kualitas demokrasi, dan langkah-langkah untuk meredakan hoaks. Tahap selanjutnya adalah analisis data, yang meliputi pembacaan mendalam, interpretasi konten

sumber, perbandingan dengan hasil penelitian yang ada, dan menghubungkan berbagai temuan dengan fokus penelitian. Tahap akhir adalah menyusun hasil akhir berdasarkan data yang telah dikaji

Data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini terdiri dari informasi kualitatif, yang terdiri atas narasi, landasan teori, gagasan, dan penelitian terdahulu, serta dokumen yang terkait berdasarkan penyebaran hoaks dan demokrasi digital. Peneliti berperan sebagai instrumen utama, yang mengarahkan fokus penelitian, mengumpulkan data, memilih sumber-sumber, serta melakukan analisis dan penarikan kesimpulan. Alat tambahan yang digunakan mencakup lembar dokumentasi, catatan literatur, dan tabel klasifikasi data untuk membantu dalam mengatur informasi berdasarkan kategori yang dibahas. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yang melibatkan pengumpulan referensi tertulis yang relevan, mencatat informasi penting, mengutip data yang diperlukan, dan menyusun informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selain itu, keabsahan data dipertahankan Dengan menggunakan cara memeriksa sumber, kami membandingkan informasi dari berbagai referensi untuk memastikan bahwa data yang kami kumpulkan adalah benar lebih objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis dilakukan secara deskriptif dan kualitatif melalui tiga tahap utama: pengurangan data dengan memilih dan menyederhanakan informasi relevan yang sejalan dengan fokus penelitian, menyajikan data dalam narasi yang sistematis berdasarkan tema yang dibahas, dan menarik kesimpulan melalui interpretasi data yang telah dikumpulkan. Hasil analisis kemudian digunakan untuk memahami hubungan antara penyebaran hoaks, kualitas demokrasi, dan efektivitas strategi mitigasi yang dapat diterapkan di Indonesia. Dengan demikian, metode yang dipakai dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penyebaran hoaks di Indonesia serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi, bersamaan dengan berbagai upaya mitigasi yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebaran Hoaks di Indonesia Media Sosial

Secara mendalam, media sosial bekerja dengan prinsip memaksimalkan durasi pengguna di dalam platform. Algoritma rekomendasi tidak dirancang untuk membedakan kebenaran, melainkan untuk memicu interaksi (engagement). Hoaks, yang biasanya dirancang dengan judul bombastis (clickbait) dan konten emosional, cenderung mendapatkan keterlibatan (like, share, comment) lebih tinggi daripada berita faktual yang datar. Hal ini menciptakan siklus di mana platform secara tidak sengaja "menguntungkan" penyebaran konten palsu. (Mahrani & Sartika, 2025)

Mekanisme dan Aktor Penyebaran Hoaks

Penyebaran hoaks di Indonesia sering kali bersifat terstruktur, terutama saat momentum politik. Media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan X (Twitter) menjadi medium utama karena fitur berbagi yang instan. Fenomena ini diperkuat oleh keberadaan "pasukan siber" atau buzzers yang menggunakan narasi manipulatif untuk menggiring opini publik demi kepentingan ideologis maupun komersial. (Juditha, 2018)

Literasi Digital dan "Critical Thinking" yang Terfragmentasi

Masalah hoaks di Indonesia bukan hanya soal akses internet yang cepat, tetapi kesenjangan antara kemampuan teknis mengoperasikan gadget dengan kemampuan kritis mengolah informasi. Masyarakat sering kali terjebak dalam heuristik (jalan pintas mental), di mana informasi dibagikan hanya karena ingin menjadi yang pertama tahu atau ingin membantu orang lain, tanpa melakukan verifikasi. Kurangnya pemahaman tentang cara kerja mesin pencari dan cek fakta mandiri membuat hoaks terus diproduksi secara organik. (Lankshear & Knobel, 2008)

Aspek Psikologis: Filter Bubble dan Echo Chamber

Masyarakat Indonesia rentan terhadap hoaks karena adanya fenomena filter bubble. Algoritma media sosial biasanya menunjukkan informasi yang sesuai dengan apa yang disukai pengguna. Hal ini menciptakan echo chamber (ruang gema), di mana seseorang hanya mendengar informasi yang mendukung keyakinannya, sehingga meskipun informasi tersebut hoaks, ia akan dianggap sebagai kebenaran (confirmation bias). (Pariser, 2011)

Dampak paling nyata dari hoaks di Indonesia adalah polarisasi masyarakat yang tajam. Hoaks sering kali mengeksploitasi isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Hal ini memicu hilangnya rasa percaya (social distrust) antar warga negara dan terhadap institusi resmi, yang pada titik ekstrem dapat memicu konflik fisik di dunia nyata. (Pramanda et al., 2018).

Faktor dan Penyebab Penyebaran Hoaks di Indonesia

Faktor Penyebaran Hoaks:

1. Rendahnya Literasi Digital dan "Information Overload"
Indonesia memiliki tingkat penggunaan internet yang sangat tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan kemampuan untuk melakukan penilaian secara kritis. Masyarakat sering mengalami information overload (banjir informasi), di mana otak manusia cenderung mengambil jalan pintas dalam memproses data. Ketika seseorang terpapar ribuan informasi per hari, mereka cenderung menggunakan "heuristik" atau intuisi daripada analisis mendalam. Jika sebuah informasi terlihat menarik atau sesuai dengan emosinya, mereka akan langsung membagikannya. (Lubis et al., 2023)
2. Budaya Komunal dan Kepercayaan pada Kelompok (In-Group)
Masyarakat Indonesia memiliki sifat kolektivitas yang tinggi. Di platform seperti WhatsApp, grup keluarga atau alumni sering menjadi sumber utama informasi. Seseorang cenderung lebih percaya pada informasi salah yang dibagikan oleh teman dekat atau keluarga daripada informasi benar dari otoritas resmi. Fenomena ini disebut sebagai Social Proof. Jika "semua orang di grup membagikannya", maka dianggap benar. (Nasrullah, 2017)
3. Arsitektur Algoritma dan Filter Bubble
Platform media sosial didesain untuk mempertahankan perhatian pengguna. Algoritma mencatat apa yang Anda sukai dan memberikan konten serupa secara terus-menerus. Jika seseorang pernah mengeklik satu berita hoaks tentang kesehatan, algoritma akan terus menyuguhkan konten serupa. Ini menciptakan Filter Bubble, di mana pengguna tidak pernah melihat sudut pandang yang berbeda. (Pariser, 2011)

Penyebab Penyebaran Hoaks

1. Polarisasi Politik dan "Tribalisme" Digital
Hoaks sering dijadikan instrumen perang urat syaraf (psychological warfare) terutama menjelang pemilu atau peristiwa politik besar. Pembuat hoaks memproduksi narasi yang menyerang lawan politik dengan bumbu sentimen agama atau etnis (SARA). Karena masyarakat sudah terbelah (polarisasi), mereka akan dengan senang hati menyebarkan hoaks tersebut untuk mempermalukan pihak lawan. (Safitri et al., 2022)
2. Konfirmasi Bias (Confirmation Bias) secara Psikologis
Ini adalah penyebab internal yang ada di dalam pikiran setiap individu. Otak manusia secara alami menyukai informasi yang memperkuat apa yang sudah mereka yakini. Jika seseorang membenci suatu vaksin, mereka akan secara otomatis percaya pada hoaks yang mengatakan vaksin itu berbahaya, tanpa peduli kredibilitas sumbernya. Menolak hoaks tersebut akan menyebabkan ketidaknyamanan mental (Cognitive Dissonance). (Greenwald & Ronis, 1978)
3. Kebutuhan akan Pengakuan (Status Sosial)
Di era digital, "menjadi yang pertama tahu" memberikan kepuasan psikologis. Banyak orang menyebarkan hoaks karena ingin dianggap sebagai orang yang peduli atau paling tahu di grupnya. Mereka tidak bermaksud buruk, namun kebutuhan untuk mendapatkan likes atau balasan "terima kasih infonya" di grup WhatsApp menjadi pendorong kuat untuk menyebarkan pesan berantai tanpa verifikasi. (Wardle & Derakhshan, 2017)

Dampak Hoaks Terhadap Kualitas Demokrasi

Penyebaran informasi palsu atau hoaks memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Di Era digital sekarang, informasi bisa tersebar dengan sangat cepat lewat media sosial, sehingga orang-orang sering menerima berita tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Situasi ini menjadikan hoaks sebagai ancaman yang serius, karena dapat mempengaruhi cara pandang, sikap, dan pengambilan keputusan.

masyarakat dalam konteks demokrasi. Hoaks tidak hanya merusak kualitas informasi yang ada di masyarakat, tetapi juga dapat memicu konflik sosial, menurunkan tingkat kepercayaan publik, serta mengacaukan proses pemilihan umum yang seharusnya berlangsung secara jujur dan adil. (Rio Gustrinanda, 2023)

1. Opini Publik Menjadi Salah
Hoaks menyebabkan masyarakat menerima berita yang tidak benar, sehingga opini publik terbentuk dari kebohongan, bukan dari fakta. Dalam suatu sistem demokrasi, masyarakat

membutuhkan informasi yang tepat agar bisa membuat keputusan politik yang rasional, seperti saat memilih pemimpin atau mengevaluasi kebijakan pemerintah. Jika masyarakat terus terpapar hoaks, keputusan politik yang diambil dapat menjadi salah dan merugikan negara. Di era digital, hoaks sering kali disebarluaskan melalui media sosial dengan judul yang provokatif, sehingga mudah diterima dan dibagikan tanpa melakukan pengecekan fakta. Hal ini membuat masyarakat sulit untuk membedakan antara informasi yang benar dan yang salah. (Rianissa, 2025)

Sebaran informasi palsu melalui media digital dapat memengaruhi cara masyarakat dalam memahami isu politik. Berdasarkan penelitian Ibrahim dan Pate (2019), berita bohong memiliki dampak negatif terhadap demokrasi karena dapat menyesatkan publik dan memengaruhi hasil pemilihan umum.

2. Penurunan Kepercayaan Publik

Penyebaran hoaks dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, media, lembaga negara, bahkan terhadap proses demokrasi itu sendiri. Ketika masyarakat terus mendapatkan informasi palsu mengenai korupsi, kecurangan, atau fitnah politik tanpa bukti yang jelas, muncul rasa curiga dan ketidakpercayaan terhadap institusi publik. Apabila kepercayaan publik menurun, masyarakat akan enggan berpartisipasi dalam proses demokrasi, karena merasa pemerintah atau sistem politik tidak dapat dipercaya. Keadaan ini berbahaya, mengingat demokrasi sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap aturan dan lembaga negara. (Sundara Kashyap Vadapalli, 2026)

Menurut Aris Sarjito (2024), penyebaran berita palsu dan informasi yang menyesatkan melalui media sosial memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah serta memperburuk perpecahan politik di masyarakat. Rendahnya pemahaman digital membuat masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar.

3. Polarisasi Masyarakat

Hoaks sering digunakan untuk menyerang kelompok tertentu, memprovokasi kebencian, dan memperlebar perbedaan politik. Akibatnya, masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling membenci dan sulit menerima pandangan yang berbeda. Polarisasi menyebabkan diskusi demokrasi menjadi tidak sehat, karena masyarakat lebih mudah terbawa emosi daripada berdialog secara rasional. Media sosial juga menciptakan situasi echo chamber, yaitu kondisi di mana seseorang hanya menerima informasi yang sesuai dengan keyakinannya, sehingga semakin sulit menerima fakta yang berbeda. Contoh nyata terlihat pada perdebatan politik di media sosial yang sering berubah menjadi konflik antar pendukung, saling menghujat, bahkan menyebarkan ujaran kebencian. (Anggraini, 2025)

Menurut Febriansyah dan Nani Nurani Muksin (2020), media sosial berfungsi sebagai alat utama dalam menyebarkan hoaks karena kecepatan dan kemudahan yang ditawarkannya untuk menyebarkan informasi. Penyebaran hoaks ini tidak hanya menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat, tetapi juga dapat merusak kualitas demokrasi dan memicu perpecahan di dalam bangsa.

Hoaks dalam politik Indonesia sering kali menggunakan isu ras, agama, dan kelompok tertentu untuk memengaruhi masyarakat. Menurut Pratiwi Utami (2018), hoaks dapat meningkatkan polarisasi sosial dan menjadi bahaya bagi demokrasi partisipatif karena membuat masyarakat lebih cenderung percaya pada sentimen daripada pada fakta.

4. Gangguan terhadap Pemilu

Hoaks dapat memengaruhi pelaksanaan pemilu melalui fitnah politik, manipulasi informasi, serta penyebaran berita palsu tentang kandidat maupun proses pemungutan suara. Informasi yang salah ini dapat membuat pemilih bingung, takut, atau membuat keputusan berdasarkan informasi yang keliru. Selain itu, penggunaan akun palsu (bots) dan kampanye disinformasi di media sosial terbukti dapat memperburuk penyebaran berita palsu selama masa pemilu. Hal ini mengancam keadilan dan kejujuran demokrasi, karena hasil pemilu dapat dipengaruhi oleh manipulasi informasi, bukan oleh pilihan rasional rakyat. (Chengcheng Shao, 2018)

Penyebaran informasi yang salah dalam pemilu dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap calon dan juga proses demokrasi itu sendiri. Berdasarkan pendapat Febriansyah Putra dan Haldi Patra (2023), pendidikan politik dan penguasaan media digital sangat krusial dalam mencegah penyebaran informasi yang salah serta memperkuat demokrasi di Indonesia.

Berita palsu dapat mengganggu pelaksanaan pemilu karena digunakan untuk memengaruhi pandangan masyarakat dan menyerang pesaing politik. Anthony J. Gaughan (2016) menjelaskan

bahwa penyebaran berita bohong dalam pemilu dapat memperparah polarisasi politik dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Upaya Mengatasi Hoaks Dalam Demokrasi Literasi Digital

Dalam konteks demokrasi, literasi digital menjadi kebutuhan mendasar di era penggunaan internet dan media sosial yang semakin sering. Orang-orang yang memiliki kemampuan literasi digital yang baik bisa lebih mudah membedakan antara fakta dan pendapat, serta menilai seberapa terpercaya sumber informasi yang mereka dapatkan, serta tidak mudah terpengaruh oleh konten yang bersifat provokatif maupun manipulatif. Hal ini penting karena hoaks dapat memengaruhi pilihan politik, merusak kualitas demokrasi, dan mengganggu persatuan sosial. Oleh sebab itu, upaya mengatasi hoaks dalam demokrasi perlu dilakukan melalui pendidikan literasi digital sejak dini, pembiasaan budaya cek fakta, penggunaan media sosial secara bijak, serta pelaporan konten palsu untuk menciptakan ruang informasi yang sehat, akurat, dan bertanggung jawab. (Sabrina et al., 2018)

Selain peningkatan kemampuan individu, pemberantasan hoaks juga membutuhkan dukungan kebijakan dan regulasi yang kuat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menghadirkan lembaga independen di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk melakukan verifikasi berita serta menyediakan aplikasi pengecekan fakta yang mudah diakses masyarakat. Upaya lain yang dapat dilakukan meliputi pengurangan akun anonim melalui verifikasi identitas, penguatan kampanye anti-hoaks, peningkatan produksi konten positif, serta penegakan hukum dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar memberikan efek jera bagi pembuat maupun penyebar berita palsu (Febriansyah, 2016)

Munculnya hoaks di berbagai platform media sosial menjadi persoalan serius yang harus diatasi dengan memperkuat pemahaman literasi digital masyarakat. Literasi digital memberikan kemampuan bagi individu untuk berpikir kritis saat menggunakan media sosial, seperti mengenali ciri-ciri hoaks, memeriksa keakuratan informasi, serta mengambil langkah yang tepat terhadap informasi yang tidak benar. Selain itu, pola pikir kognitif dan kritis juga penting untuk melatih masyarakat berpikir objektif, memilih sumber yang terpercaya, membandingkan berbagai informasi, dan melakukan verifikasi sebelum menyebarkan berita. Dengan demikian, masyarakat perlu membiasakan diri membaca informasi secara menyeluruh dan tidak mudah terpengaruh oleh berita yang menyesatkan (Sari et al., 2021)

Penguatan literasi digital juga harus dibarengi dengan kerja sama antara pemerintah, platform media sosial, organisasi non-profit, dan masyarakat sipil dalam mengawasi arus informasi digital. Menurut Anatasya et al. (2024), peningkatan literasi digital sangat penting untuk melawan hoaks dan disinformasi, terutama menjelang pemilu ketika penyebaran informasi palsu cenderung meningkat. Oleh karena itu, pemerintah perlu bekerja sama dengan platform media sosial untuk mengidentifikasi serta menindak akun yang terlibat dalam kampanye disinformasi politik, sehingga media sosial dapat dimanfaatkan secara positif dalam mendukung demokrasi yang sehat dan transparan di Indonesia. (Zaky & Fatih, 2024)

Peran Pemerintah

Kemajuan dalam teknologi informasi dan media sosial memudahkan kita untuk mengakses berbagai macam berita, tetapi juga membuka peluang penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam, terutama menjelang pemilu. Kondisi ini menjadikan pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi dari ancaman disinformasi. Pemerintah telah menerapkan berbagai regulasi, seperti peraturan informasi dan Transaksi Digital (UU ITE), kitab undang-undang hukum kriminal (KHUP), serta ketentuan kampanye online yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengawasi aktivitas di ruang digital selama proses demokrasi berlangsung. Selain itu, pemerintah juga melakukan pemblokiran situs penyebar hoaks, memperkuat keamanan siber, serta bekerja sama dengan berbagai lembaga guna mengurangi penyebaran berita palsu. Meskipun demikian, penanganan hoaks masih menghadapi tantangan, khususnya dalam melacak pelaku yang menggunakan akun anonim atau identitas palsu. (Salman, 2023)

Selain melalui regulasi, pemerintah juga melakukan langkah preventif melalui program edukasi, seperti Internet Sehat dan Aman, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan internet secara bijak. Program ini bertujuan membekali masyarakat dengan kemampuan menganalisis berita, membedakan informasi benar dan salah, serta memahami dampak negatif penggunaan internet

yang tidak bertanggung jawab. Di samping itu, pemerintah juga menyusun berbagai aturan hukum yang dapat menjerat pelaku penyebaran hoaks sehingga mampu menekan jumlah pembuat maupun penyebar informasi palsu di ruang digital.(Imam, 2021)

Upaya pemerintah dalam menanggulangi hoaks juga diwujudkan melalui penguatan lembaga keamanan siber yang bertugas melacak sumber berita palsu serta melindungi infrastruktur digital dari ancaman siber. Pemerintah turut mempercepat penanganan hoaks dengan menjalin kerja sama bersama platform media sosial, seperti Facebook, agar penyebaran informasi palsu dapat ditangani secara lebih efektif. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga lain, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk mengedukasi masyarakat agar lebih kritis dan selektif dalam menerima informasi. Pemerintah juga menyediakan layanan pengaduan konten negatif sehingga masyarakat dapat melaporkan hoaks yang ditemukan di internet, guna menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan demokrasi yang lebih berkualitas.(Marwan, 2016)

Peran Masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menangani penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di ruang digital, terutama pada momen demokrasi seperti pemilihan umum. Peran ini dapat diwujudkan dengan melaporkan konten yang mencurigakan kepada platform digital atau pihak berwenang, menyebarluaskan informasi yang benar dan terverifikasi,

serta berpartisipasi aktif dalam kampanye edukasi mengenai bahaya hoaks dan ujaran kebencian. Selain itu, masyarakat perlu mengembangkan kemampuan literasi digital yang mumpuni sehingga dapat mengevaluasi keakuratan informasi, berpikir secara analitis, dan tidak gampang terpengaruh oleh narasi yang menipu. Keterlibatan dalam komunitas yang peduli terhadap isu hoaks, mengikuti diskusi publik, serta memberikan edukasi di lingkungan sekitar juga merupakan bentuk kontribusi nyata dalam menciptakan ruang digital yang lebih sehat. Dengan meningkatnya kesadaran individu, penerapan etika komunikasi, serta kerja sama antara masyarakat dan pemerintah, penyebaran hoaks dapat diminimalisir sehingga stabilitas sosial dan kualitas demokrasi tetap terjaga.(Salman, 2023)

Peran masyarakat dalam mencegah penyebaran hoaks selama pemilu juga sangat penting untuk memastikan demokrasi tetap berkualitas. Masyarakat harus memiliki keterampilan dalam literasi digital dan informasi agar mampu memilah, menganalisis, serta memverifikasi keakuratan berita sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Sikap kritis terhadap informasi politik perlu dikembangkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi, terpecah belah, maupun kehilangan kepercayaan terhadap lembaga demokrasi. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik juga dapat meningkatkan pemahaman mengenai pemilu sehingga tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah. (Putra & Patra, 2023)

Berbagai cara yang dapat dilakukan masyarakat dalam menangkal hoaks selama pemilu antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman tentang literasi digital dan media, seperti memeriksa asal informasi serta mengenali ciri-ciri berita palsu.
2. Melakukan pengecekan fakta dengan membandingkan informasi dari sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya.
3. Berpartisipasi dalam pendidikan politik melalui diskusi, seminar, maupun keterlibatan langsung dalam kegiatan demokrasi.
4. Menggunakan media sosial secara bijak, yaitu tidak membagikan informasi yang belum terbukti kebenarannya serta melaporkan konten hoaks yang ditemukan.
5. Bekerja sama dengan pemerintah, media, dan organisasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat dan mendukung demokrasi yang transparan.

Dalam konteks ini, generasi muda menjadi bagian penting dalam menangkal hoaks di era digital. Generasi muda dinilai memiliki kemampuan literasi digital yang lebih baik serta kedekatan yang tinggi dengan platform media sosial. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui penggunaan media sosial secara etis, penyebaran informasi politik yang benar, serta pembiasaan berpikir kritis untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Selain itu, generasi muda juga dapat berkontribusi dengan melaporkan akun atau konten yang mengandung hoaks, mempromosikan nilai persatuan, toleransi, dan nasionalisme, serta bergabung dalam komunitas anti-hoaks seperti Turn Back Hoax atau MAFINDO. Dengan partisipasi aktif generasi muda, media sosial tidak hanya menjadi sarana bertukar informasi, tetapi juga media pendidikan politik yang positif untuk mendukung demokrasi yang lebih baik (Kartika, 2023)

SIMPULAN

Penyebaran hoaks di Indonesia merupakan tantangan besar bagi kehidupan demokratis, terutama di era digital sekarang ini di mana penggunaan media sosial sangat tinggi dan aliran informasi begitu cepat. Penyebaran disinformasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat, kebiasaan budaya kolektif yang kuat, algoritma media sosial yang mendorong keterlibatan pengguna, polarisasi politik, dan kecenderungan psikologis seperti bias konfirmasi. Situasi ini mempermudah orang untuk menerima dan membagikan informasi tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu.

Dampak dari disinformasi sangat memengaruhi kualitas demokrasi, termasuk terbentuknya opini publik yang salah, menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga negara, meningkatnya perpecahan sosial, dan gangguan pada proses pemilihan yang seharusnya adil dan transparan. Oleh karena itu, penanganan informasi palsu memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Pemerintah perlu memperbaiki regulasi, pengawasan, dan pendidikan digital, sedangkan platform media sosial harus bertanggung jawab lebih dalam mengatasi penyebaran konten yang tidak benar. Selain itu, masyarakat juga berperan penting dalam meningkatkan pemahaman digital, mengembangkan kebiasaan memeriksa fakta, menggunakan media sosial dengan bijak, dan secara aktif melaporkan informasi yang menyesatkan. Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, lingkungan digital yang lebih sehat dapat dibentuk, sehingga demokrasi di Indonesia dapat berkembang dengan lebih efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu, teman-teman kelompok, serta seluruh pihak yang telah memberikan arahan, dukungan, dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social media and fake news in the 2016 election. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 211–236.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). *Survei internet Indonesia 2024*. APJII. <https://apjii.or.id>
- Gilster, P. (1997). *Digital literacy*. Wiley Computer Publishing.
- Kurnia, N., & Astuti, S. I. (2017). Peta gerakan literasi digital di Indonesia: Studi tentang pelaku, ragam kegiatan, kelompok sasaran dan mitra. *Informasi*, 47(2), 149–166.
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427.
- UNESCO. (2019). *Journalism, fake news & disinformation: Handbook for journalism education and training*. UNESCO Publishing.
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Council of Europe.
- Assyahida, T. N. (2025). *Disinformasi Pemilu Digital sebagai Ancaman Transnasional : Implikasi terhadap Kedaulatan Demokrasi Indonesia*. 2019.
- Sarjito, A. (2024). *Hoaks , Disinformasi , dan Ketahanan Nasional : Ancaman Teknologi Informasi dalam Masyarakat Digital Indonesia*. 175–186.
- Juditha, C. (2018). Hoax communication interactivity in social media and anticipation (Interaksi komunikasi hoax di media sosial serta antisipasinya). *Jurnal Pekommas*, 3(1), 31–44.
- Lankshear, C., & Knobel, M. (2008). *Digital literacies: Concepts, policies and practices (Vol. 30)*. Peter Lang.
- Mahrani, A. S., & Sartika, I. (2025). Analisis Jaringan Penyebaran Hoaks Sains ‘City Lights di Proxima b’ di X Menggunakan Social Network Analysis. *Edutik: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 5(4), 808–815.
- Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the Internet is hiding from you*. penguin UK.

- Pramanda, A. Y., Muchtarom, M., & Hartanto, R. V. P. (2018). Penguatan Etika Digital pada Siswa untuk Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (Studi SMA/SMK di Surakarta). *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 21(2), 1–13.
- Greenwald, A. G., & Ronis, D. L. (1978). Twenty years of cognitive dissonance: Case study of the evolution of a theory. *Psychological Review*, 85(1), 53.
- Lubis, P., Mardianto, M., & Nasution, M. I. P. (2023). Gerakan literasi sekolah: Tantangan literasi di era digital dan cara mengatasinya. *Jurnal Media Infotama*, 19(2), 487–496.
- Nasrullah, R. (2017). Blogger dan digital word of mouth: getok tular digital ala blogger dalam komunikasi pemasaran di media sosial. *Jurnal Sosioteknologi*, 16(1), 1–16.
- Safitri, R., Kelmaskouw, A. L., Deing, A., Bonin, B., & Haryanto, B. A. (2022). Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 377–385.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking* (Vol. 27). Council of Europe Strasbourg.
- Adamkolo Mohammed Ibrahim, U. A. (2019). In a Democratized Media Context What a Hoax Can Do, a Misinformation Can Do Even Worse. *New media and mass communication*.
- Anggraini, S. I. (2025). Tantangan Demokrasi Pancasila di Era Digital. *Maliki Interdisciplinary Journal*.
- Chengcheng Shao, G. L. (2018). The spread of low-credibility content by social bots. *Nature Communications*.
- Febriansyah Putra, H. P. (2023). Analisis Hoax Terhadap Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Pendidikan Politik. *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*.
- Febriansyah, N. N. (2024). Fenomena Media Sosial: Antara Hoax, Destruksi Demokrasi, dan Ancaman Disintegrasi Bangsa. *Sebatik*.
- Gaughan, A. J. (2016). *Illiberal Democracy: The Toxic Mix of Fake News, Hyperpolarization, and Partisan Election Administration*. *Duke Journal of Constitutional Law & Public Policy*.
- Rianissa, S. N. (2025). Disinformasi di Era Post-Truth: Ancaman Terhadap Demokrasi dan Mobilitas Global. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial, Dan Politik*.
- Rio Gustrinanda, T. T. (2023). Pengaruh Berita Hoax Terhadap Kepercayaan Masyarakat Dalam Pemilu di Indonesia. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 160-163.
- Sarjito, A. (2024). Hoaks, disinformasi, dan ketahanan nasional: Ancaman teknologi informasi dalam masyarakat digital Indonesia. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*.
- Sundara Kashyap Vadapalli, S. D. (2026). Exploring the impact of online misinformation on Ideological Polarisation and Institutional distrust: an integrative review and strategic framework for counteraction. *SN Social Sciences*.
- Utami, P. (2018). Hoax in Modern Politics: The Meaning of Hoax in Indonesian Politics and Democracy. *Jurnal Sosial dan Ilmu Politik*.